LAPORAN PENELITIAN

KERJA SAMA PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PUSLITJAK
DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA
TAHUN 2014

JUDUL PENELITIAN:

PENGARUH PROFESIONALISME GURU YANG SUDAH DISERTIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SD DAN SMA/SMK DI KABUPATEN BARITO KUALA

Oleh:

1. Ketua : Baseran Nor, M.Pd.
2. Anggota : Dr. Deasy Arisanty, M.Sc.
3. Anggota : Mahmudah Hasanah, M.Pd.
4. Anggota : Sugimin, SKM, M.Kes
5. Anggota : Drs. H. Sarbini, M.Pd.

JARLIT KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014

HALAMAN PENGESAHAN
KERJA SAMA PENELITIAN ANTARA PUSLITJAK DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA

1.	Judul Penelitian	PENGARUH PROFESIONALISME GURU YANG SUDAH DISERTIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SD DAN SMA/SMK DI KABUPATEN BARITO KUALA
2.	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. Pangkat dan Golongan/Ruang d. NIP atau Nomor indetitas lain e. Nama Jarlit Prov/Kab/Kota f. Alamat Kantor g. Nomor HP h. *E-mail address*	 Baseran Nor, M.Pd. Laki-laki Penata Muda Tingkat I/ III b 19820321 200604 1 001 Jarlit Kabupaten Barito Kuala Jl. Komplek Perkantoran Barito Kuala 081225829545 pendidikanekonomi21@gmail.com
3.	Lama Penelitian	3 Bulan
4.	Biaya Penelitian a. Beban Puslitjak b. Beban Jarlit / Kota c. Lainnya ..	Rp. 50.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) - Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Rp. ...

Marabahan, 12 Oktober 2014

Kepala BAPEDA Kab. Batola

Ir. Achmad Kusnandar, M.Si
NIP. 19582601 198503 1 004

Ketua Peneliti,

Baseran Nor, M.Pd.
NIP 19820321 200604 1 001

TERDAFTAR DI PERPUSTAKAAN FKIP ULM BANJARMASIN
TANGGAL NOMOR
24/2 2022 330.07 BAS

ABSTRAK

Sertifikasi guru diadakan dalam upaya meningkatkan kinerja guru agar menjadi guru yang profesional dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Seorang guru dikatakan professional jika memiliki empat kompetensi yaitu pedagogik, professional, sosial dan kepribadian. Sejak tahun 2012 pemerintah mengadakan Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam rangka mengukur kompetensi pedagogik dan professional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat: 1) gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala, 2) gambaran mutu pendidikan di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala, dan 3) pengaruh profesionalisme guru yang sudah disertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel profesionalisme guru dengan variabel mutu pendidikan di SD dan SMA/SMK. Populasi dalam penelitian ini adalah guru kelas VI dan guru mata pelajaran yang di-UN-kan yang telah mengikuti UKG dan sudah disertifikasi dari tahun 2012-2013 sebanyak 762 guru. Teknik penarikan sampel adalah purposive random sampling dengan jumlah 311 responden. Namun pada kenyataan di lapangan yang dapat dijadikan sampel hanya sebanyak 314 orang karena gurunya meninggal atau pindah tugas. Sedangkan yang dianalisis hanya sebanyak 127 guru yang ada data nilai UKG. Teknik pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala berdasarkan nilai UKG dan hasil perhitungan kompetensi sosial dan kepribadian termasuk kategori tinggi. Gambaran mutu pendidikan di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala dengan melihat nilai UN untuk masing-masing mata pelajaran selama 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata 6,82 untuk SD dengan kategori tinggi dan 7,10 untuk SMA/SMK dengan kategori sedang. Terdapat pengaruh kompetensi guru yang disertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD kabupaten Barito Kuala sebesar 37% dengan kategori rendah dan 73% untuk tingkat SMA/SMK dengan kategori kuat.

Opsi kebijakan yang dapat dilakukan adalah perlunya menganalis soal dan hasil UKG untuk melihat kompetensi yang belum tercapai. Ketersediaan data hasil UKG di dinas pendidikan agar memudahkan dalam pemetaan kompetensi guru di masa yang akan datang dan menggalakkan kegiatan pengembangan kompetensi seperti adanya guru magang, mengadakan symposium guru dan lain-lain.

Kata Kunci: Kompetensi, pedagogik, profesional, sosial, kepribadian, dan UN

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

HALAMAN PENGESAHAN ii

ABSTRAK iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Ruang Lingkup 5
E. Hasil yang Diharapkan 5

BAB II KAJIAN TEORI 6

A. Kajian Teori 6
1. Sertifikasi Guru 6
a. Pengertian Sertifikasi Guru 6
b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru 6
c. Prinsip Sertifikasi Guru 7
d. Ruang Lingkup Kegiatan Sertifikasi Guru 9
2. Profesionalisme Guru 12
a. Pengertian Profesionalisme Guru 12
b. Dimensi Profesionalisme Guru 14
c. Ciri-ciri Guru Profesional 15
d. Kompetensi Guru 16
e. Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Guru 20
3. Mutu Pendidikan 23
a. Ujian Nasional 24
B. Kerangka Berpikir 29

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Pendekatan yang Digunakan 30
B. Populasi dan Sampel 30
1. Populasi 30

2. Sampel 31
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 31
1. Teknik Angket 31
2. Teknik Dokumentasi 33
D. Pengolahan dan Analisis Data 33
1. Analisis Deskriptif 33
2. Analisis Korelasional 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

A. Hasil Penelitian 35
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 35
2. Deskripsi Karakteristik Responden 36
3. Hasil Penelitian 38
a. Gambaran Profesionalisme guru yang sudah disertifikasi di tingkat SMP Kabupaten Barito Kuala 38
b. Gambaran Mutu Pendidikan di SMP kabupaten Barito Kuala... 39
c. Pengaruh Kompetensi guru yang Disertifikasi terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Tingkat SMP kabupaten Barito Kuala..... 39
B. Pembahasan Hasil Penelitian 41

BAB V PENUTUP 44

A. Kesimpulan 44
B. Opsi Kebijakan 44

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum adanya UU Guru dan Dosen No 14 tahun 2005, profesi guru di Indonesia merupakan suatu profesi yang penuh dengan kesabaran. Sesuai dengan pepatah yang ada di tengah masyarakat yang memandang guru sebagai "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" dimana guru dituntut untuk selalu mengorbankan jiwa dan raga untuk mencerdaskan putera-puteri bangsa sedangkan imbalan atau gaji yang diberikan sangat kecil. Jabatan guru memang mendapatkan tempat di hati masyarakat, tetapi ketika berbicara tentang kesejahteraan, jauh dari yang diharapkan. Kalau dilakukan analisis kesejahteraan antara semua bidang pekerjaan, maka dapat dipastikan guru adalah jabatan yang mempunyai tingkat kesejahteraan terendah. Apalagi kalau berbicara tentang guru yang honorer yang menerima gaji tidak lebih dari Rp 100.000,00 per bulan. Sehingga profesi guru dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kondisi kesejahteraan yang serba kekurangan tentunya mengharuskan guru mencari alternatif penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak mengherankan ada guru yang setelah mengajar di sekolah melakukan kerja tambahan menjadi pemulung sampah, tukang bejak dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan banyak guru yang mengajar tidak optimal dan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang diberikan.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, tercermin dari daya saing di tingkat internasional. Daya saing Indonesia menurut *Human Development Report 2013*, berada di level 121 dari 186 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti Singapura yang berada di urutan ke-18 dan Malaysia pada urutan ke-64.

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas (2010), guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta

ternyata hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26%.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan mengadakan sertifikasi. Adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula. Dengan jaminan UU Guru dan Dosen, terdekonstruksilah makna profesionalisme guru yang dulunya tidak diminati menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lainnya, seperti ditunjukkan dari hasil pengamatan peneliti terhadap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lambung Mangkurat. Setiap tahun ajaran baru, FKIP menerima mahasiswa lebih besar dibandingkan dengan fakultas lain seperti Pertanian, Kedokteran, dan lain-lain.

Profesionalisme dalam arti dasar adalah ketika seseorang bekerja sesuai dengan basis pendidikannya masing-masing. Seorang pengajar di lembaga pendidikan haruslah berpendidikan dari Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK). Ketika lulusan LPTK bekerja menjadi akuntan, itu tidak bisa dikatakan profesional karena tidak sesuai dengan bidang keahlian. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan adalah hal wajar ketika seorang profesional mendapatkan imbalan memadai karena dia akan bekerja maksimal sehingga menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

Guru adalah jabatan profesi, untuk itu seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, bebas dari tekanan pihak luar, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima. Pengembangan wawasan dapat dilakukan melalui forum pertemuan profesi, pelatihan ataupun upaya pengembangan dan belajar secara mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut, seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain

dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup belajar untuk mengetahui (*Learning to Know*) dimana pendidik (guru/dosen/tutor/pelatih) seharusnya menjadi seorang fasilitator. Pendidik bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Peserta didik (siswa/mahasiswa, peserta pelatihan) harus mampu menumbuhkan kemauan di dalam dirinya untuk dapat belajar mengetahui dan mempelajari lebih banyak dari apa yang telah dipelajari atau telah didapatkan sebelumnya. Peserta didik harus diletakkan dalam sebuah proses pembelajaran yang menuntut aktivitas peserta didik yang lebih besar untuk mau dan mampu mempelajari sesuatu. Artinya proses belajar mengajar yang diselenggarakan harus mampu membuat peserta didik lebih aktif. Belajar untuk melakukan sesuatu *(Learning to Do)* dimana peserta didik harus mau dan mampu (berani) mengaktualisasi keterampilan yang dimilikinya, selain bakat dan minat yang telah dimiliki sejak awal. Belajar untuk menjalani kehidupan bersama (*Learning to Live Together)* Proses pembelajaran di dalamnya harus diberikan sebuah kesempatan bagi peserta didik untuk bekerja sama satu dengan lainnya. Adanya kerja sama tersebut memungkinkan peserta didik untuk menghargai satu dengan yang lainnya, bersikap terbuka, dan mampu untuk berbagi (menerima dan memberi). Belajar untuk menjadi sesuatu/seseorang (*Learning to Be)* dimana proses pembelajaran harus memungkinkan bagi peserta didik untuk mampu menjadi seseorang yang lebih unggul dibandingkan jika tidak mengikuti proses pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dengan memberikan kesempatan untuk berkreasi sehingga menjadi lebih kreatif (Chomsin S. Widodo dan Jasmani (2008: 1- 5).

Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang dapat dibuktikan melalui proses sertifikasi. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.

Berdasarkan laporan tahunan (2012) kabupaten Barito Kuala diketahui bahwa sebagian besar guru pada berbagai tingkat jenjang pendidikan belum mendapat sertifikasi guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Sebaran guru yang sudah sertifikasi kabupaten Barito Kuala

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah guru (orang)	Sudah sertifikasi (orang)
1	TK	863	63
2	SD	2.493	1.141
3	SMP	822	467
4	SMA/SMK	487	216

Sumber: Buku Saku Disdik Barito Kuala (2012)

Pada tahun 2013, sebanyak 243 guru dari kabupaten Barito Kuala yang mengikuti sertifikasi guru. Banyaknya guru yang belum disertifikasi berakibat pada belum terukurnya kinerja para guru dan tentu saja akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang diberikan. Sesuai hasil Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMP tahun 2012 kabupaten Barito Kuala berada di posisi ke-13 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, tingkat SMA urutan ke-5, dan tingkat SMK urutan ke-7.

Pemerintah kabupaten Barito Kuala mengharapkan adanya penilaian kinerja guru terutama guru yang sudah disertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian tentang pengaruh dari sertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Barito Kuala.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi tingkat SD dan SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana gambaran mutu pendidikan tingkat SD dan SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala?

3. Bagaimana pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan tingkat SD dan SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi tingkat SD dan SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala.
2. Gambaran mutu pendidikan tingkat SD dan SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala.
3. Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan tingkat SD dan SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala?

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan pada tingkat pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah (SMA/SMK). Selain itu juga penelitian ini tidak mengambil sampel atau data dari MI, MTs, maupun MA karena mereka berada bukan di bawah kemendikbud melainkan kemenag, sehingga sulit untuk mendapatkan data baik secara primer maupun skunder.

Sedangkan nilai profesionalisme guru dilihat dari 4 kompetensi guru. Untuk kompetensi pedagogik dan professional digunakan data sekunder berupa nilai hasil UKG tahun 2012 dan 2013, sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian menggunakan data primer berupa hasil angket.

Adapun mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah hasil UN tingkat SMP di Kabupaten Barito Kuala tahun 2011 – 2013 untuk tiap mata pelajaran yang UN-kan.

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya memberikan gambaran yang pasti tentang dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan. Kalaupun tidak ada dampak, maka pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala dapat mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan dan evaluasi sertifikasi guru agar sesuai dengan tujuan awal diadakannya sertifikasi guru oleh pemerintah yaitu meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sertifikasi Guru

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Menurut Kunandar (2007: 79) sertifikasi guru adalah "proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi". Menurut Masnur Muslih (2007: 2) sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen dimana sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Dari beberapa pengertian sertifikasi guru menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi guru adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah berupa sertifikat kepada guru yang memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi.

b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Sertifikasi merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru dan peningkatan kesejahteraannya. Ini terlihat dari persyaratan yang mengharuskan guru untuk berpendidikan minimal S-1/D4 dan berkompeten untuk mengajar yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidikan yang diberikan oleh lembaga khusus sertifikasi. Adanya pengakuan

tersebut, maka guru berhak menerima imbalan berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Hasanuddin dan Cut Nurmaliah (2010: 3) tujuan utama sertifikasi adalah untuk: 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; 3) meningkatkan martabat guru; dan 4). meningkatkan profesionalitas guru.

Sedangkan menurut Ade Mulyani (2012: 52) manfaat sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak berkompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru.
2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan professional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia.
3) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5) Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

c. Prinsip Sertifikasi Guru

Menurut Jalal (2007) ada 5 prinsip yang terkandung dalam program sertifikasi, yaitu:

1) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses pengolahan sertifikat pendidik yang tidak terpisah, tidak membedakan, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu

mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2) Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemeirntah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku baik bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus Non PNS.

3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan professional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangan menjadi

kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran.

5) Jumlah sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Jumlah peserta sertifikasi guru setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan tersebut, maka disusunlah kouta guru peserta sertifikasi guru untuk maisng-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kouta tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per kabupaten/kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

d. Ruang Lingkup Kegiatan Sertifikasi Guru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui:

1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL)

Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut:

a) Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

b) Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari Perguruan Tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

c) Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan

tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

d) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

e) Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui *in passing*).

2) Penilaian Portofolio (Pola PF)

Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikut-sertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Peserta sertifikasi pola PF adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi, namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi

melalui pola PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA).

3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan *workshop* menggunakan pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah. *Workshop* dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi.

Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai *passing grade* penilaian portofolio atau Tidak Lulus Verifikasi Portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pelaksanaan PLPG mengikuti mata pelajaran bidang keahliannya atau latar belakang pendidikan S1-nya.

Sertifikasi guru Pola PSPL, PF, dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang memperoleh penugasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Bagi Rayon LPTK yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang

memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 disajikan pada Gambar di bawah ini:

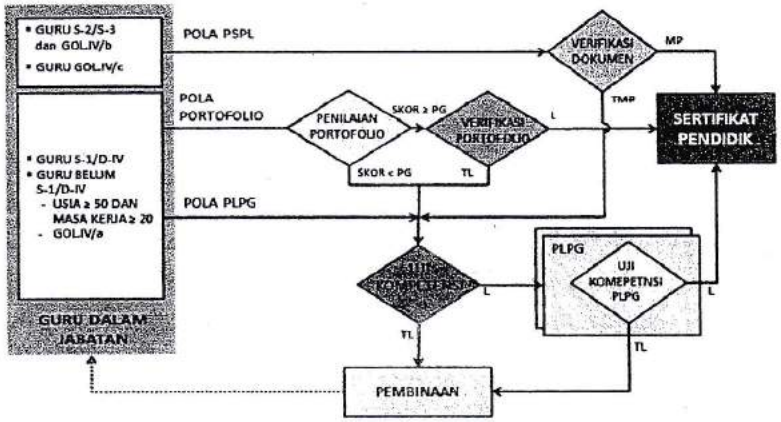

Gambar 2.1. Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan (Buku 2, 2013: 4-6)

2. Profesionalisme Guru

a. Pengertian Profesionalisme Guru

Secara umum istilah profesionalisme sudah dikenal luas di kalangan masyarakat. Pengertian yang muncul di masyarakat umum seolah-olah hanya teruntuk bagi personil tingkat manajer, sedangkan sesungguhnya istilah profesional itu berlaku untuk semua personil mulai dari tingkat atas sampai ketingkat paling bawah. Pengertian profesional secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Oleh karena itu seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Di samping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan mentalitasnya. Jadi yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari

perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.

Merujuk UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2) Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab.
3) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
4) Memiliki jaminan perlindungan hukum,
5) Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru
6) Dengan demikian jelaslah bahwa guru bukanlah perkerjaan "sambilan", tetapi seorang intelektual yang harus menyesuaikan diri dengan situasi dan persoalan yang dihadapi. Apabila pendidikan di Indonesia ini ingin maju dan berhasil, maka memang para guru, yang menjadi ujung tombaknya harus sungguh profesional, baik dalam bidang keahliannya (kompetensi), dalam bidang pendampingan, dan dalam kehidupannya yang dapat dicontoh oleh siswa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disebutkan bahwa profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Menurut Jamil Suprihatiningrum (2013: 150) ada tiga bidang yang harus dikuasai oleh seorang guru yang professional dalam menjalani profesinya, yaitu (1) ahli dalam bidang pembelajaran, (2) terampil dalam bidang penelitian, dan (3) memiliki kompetensi dalam pengabdian kepada masyarakat.

b. Dimensi Profesionalisme Guru

Menurut Cepi Triana (2009: 3). mengembangkan konsep profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu:

1) Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohani dan kemudian kepuasan material.
2) Kewajiban Sosial (*Social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya paran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat atau pun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3) Kemandirian (*Autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak yang lain.
4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5) Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok

kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

c. **Ciri-ciri guru Profesional**

Menurut Ramayulis (2013: 41 – 48) ciri-ciri guru professional dikelompokkan menjadi:

1) Ahli (*Expert*)

Keahlian dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Pemahaman konsep dapat dilakukan bila guru juga memahami psikologi belajar. Psikologi belajar membantu guru menguasai cara membimbing subyek belajar dalam memahami konsep tentang apa yang diajarkan. Selain itu guru juga harus mampu menyampaikan pesan-pesan pendidikan.

2) Memiliki rasa kesejawatan (Etika profesi)

Salah satu tugas dan organisasi adalah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Guru yang professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal atau dengan kata lain, guru professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

3) Memiliki Otonomi dan Rasa Tanggung Jawab

Otonomi adalah suatu sikap yang professional yang disebut mandiri bendasarkan keahliannya. Ciri-ciri kemandirian antara lain (1) dapat menguraikan nilai-nilai hidup (2) dapat membuat pilihan nilai, (3) dapat menentukan dan mengambil keputusan sendiri, dan (4) dapat bertanggungjawab atas keputusan itu. Guru yang professional mempersiapkan diri sematang-matangnya sebelum mengajar. Guru betul-betul menguasai materi yang akan diajarkan dan bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya.

d. Kompetensi Guru

Menurut Paul Suparno, (2005) guru yang professional adalah guru yang menguasai empat kompetensi seperti diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2005. Sedangkan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut Jamil Suprihatiningrum (2013: 100 – 116) berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 dan PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola pembelajaran)

Guru adalah seorang manager dalam pembelajaran, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran dengan cara menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntunan kebudayaan dan kebutuhan siswa, meningkatkan perencanan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

b) Pemahaman terhadap siswa

Ada empat hal yang harus difahami guru dari siswa, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, perkembangan kognitif.

c) Perancangan pembelajaran

Merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mencakup identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.

d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Tugas guru dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan pembentukan kompetensi siswa.

e) Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Penggunaan teknologi dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh siswa.

f) Evaluasi hasil belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi siswa, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, serta penilaian program.

g) Pengembangan siswa

Pengembangan siswa merupakan bagian dari kompetensi pedagogik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap siswa.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan:

a) Memiliki kepribadian mantap dan stabil

Guru dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial. Jangan sampai seorang pendidik melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, kurang professional, atau bahkan bertindak tidak senonoh.

b) Memiliki kepribadian yang dewasa

Kedewasaan guru tercermin dari kestabilan emosinya. Untuk itu, diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa emosi. Sebab, jika guru marah akan mengakibatkan siswa takut. Ketakutan itu sendiri berdampak pada turunnya minat siswa untuk mengikuti pelajaran, serta dapat mengganggu konsentrasi belajarnya.

c) Memiliki kepribadian yang arif

Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui tindakan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

d) Memiliki kepribadian yang berwibawa

Kepribadian yang berwibawa ditunjukkan oleh perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan disegani.

e) Menjadi teladan bagi siswa.

Sebagai teladan, guru menjadi sorotan siswa dalam gerak geriknya.

f) Memiliki akhlak mulia

Guru berakhlak mulia karena perannya sebagai penasehat. Niat pertama dan utama seorang guru bukanlah berorientasi pada dunia, tapi akhirat, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah.

3) Kompetensi Sosial

Berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesame pendidik, tenaga kependidikan,

orangtua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. Hal-hal yang perlu dimiliki guru sebagai makhluk sosial, meliputi:

a) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif

Agar guru dapat berkomunikasi secara efektif, terdapat tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki:

(1) Memiliki pengetahuan tentang adat dan istiadat sosial dan agama;
(2) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi;
(3) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi;
(4) Memiliki pengetahuan tentang estetika;
(5) Memiliki apresiasi dan kesadaran social;
(6) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan;
(7) Setia terhadap harkat dan martabat manusia.

b) Manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat

Pada proses penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat, terdapat empat komponen yang diperhatikan: perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

c) Ikut berperan aktif di masyarakat

Guru mengemban tugas untuk membina masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan.

d) Menjadi agen perubahan sosial

Guru adalah agen perubahan yang mampu mendorong pemahaman dan toleransi. Tugas guru adalah menterjemahkan pengalamannya yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi siswa dengan cara diskusi, bermain peran, kunjungan langsung ke masyarakat, dan lain-lain.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi professional guru menggambarkan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengampu jabatan sebagai seorang guru. Ruang lingkup kompetensi professional guru meliputi:

a) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;
b) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan siswa;
c) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya;
d) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
e) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan;
f) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
g) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa;
h) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa.

e. Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Guru

Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat di bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut agar para guru harus professional di bidangnya. Untuk itu peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat perlu dilakukan.

Menurut Ramayulis (2013: 486-491) berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2005) menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru

Kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan, maka guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan.

2) Program Penyetaraan dan Sertifikasi

Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan.

3) Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup, diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengacu pada tuntutan kompetensi.

4) Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan professional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran.

5) Simposium Guru

Melalui simposium guru diharapkan para guru menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk *sharing* pengalaman juga berfungsi untuk kompetensi antar guru, dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang.

6) Program pelatihan tradisional lainnya.

Suatu kombinasi antara materi akademis dengan pengalaman lapangan akan sangat efektif untuk pengembangan kursus/pelatihan yang mengacu pada satu aspek khusus yang sifatnya aktual dan penting untuk diketahui oleh para guru.

7) Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah

Jurnal atau makalah ilmiah lainnya secara berkesinambungan diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lain. Dengan membaca dan memahami isi jurnal atau makalah dalam bidang pendidikan guru dapat mengembangkan profesionalismenya dengan bertambahnya pengalaman.

8) Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah

Partisipasi guru minimal pada kegiatan konferensi atau pertemuan ilmiah setiap tahun akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun profesionalisme guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

9) Melakukan Penelitian (khususnya Penelitian Tindakan Kelas / PTK)

Melakukan PTK merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus menerus.

10) Magang

Bentuk pelatihan *pre-service* atau *in-service* bagi guru junior untuk secara gradual menjadi guru professional melalui proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu.

11) Mengikuti berita actual dan media pemberitaan

Pemilihan yang hati-hati program radio dan televisi, dan sering membaca surat kabar juga akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai pengembangan mutakhir dan proses pendidikan.

12) Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi

Organisasi/komunitas professional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan

memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat.

13) Menggalang kerjasama dengan teman sejawat

Pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan termasuk kerjasama dalam berbagai kegiatan lainnya (misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah) dengan kepala sekolah, orang tua siswa (komite sekolah), guru dan staf lainnya yang professional dapat membantu guru dalam memutakhirkan pengetahuannya.

14) Program supervisi sekolah

Ciri utama supervisi adalah perubahan dalam kea rah yang lebih baik, positif proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Di lingkungan sekolah, supervisi mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah.

3. Mutu Pendidikan

Ukuran mutu dalam pembelajaran memiliki keragaman, sesuai dengan keinginan peserta didik, orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Karenanya ukuran pembelajaran yang bermutu dapat berupa: kondisi yang menyenangkan bagi peserta didik ketika belajar, nilai rata-rata UN peserta didik minimal 5,5, perilaku peserta didik yang sopan dan santun, pola pikir peserta didik yang cerdas, dan berbagai hal lainnya. Tinjauan mutu pendidikan tersebut dapat diklasifikasi menjadi mutu input, mutu proses, dan mutu output pendidikan. Mutu input adalah kondisi kebermutuan pada input pendidikan, yaitu mutu kurikulum, mutu siswa, mutu guru, mutu fasilitas, dan mutu input lainnya. Mutu proses adalah kebermutuan pembelajaran yang terjadi antara peserta didik, guru, dan lingkungan pembelajaran. Tentu saja kebermutuan proses ini akan ditentukan oleh mutu input. Mutu output adalah kondisi mutu yang tercermin dari capaian mutu yang

didapat oleh lulusan suatu sekolah. Salah satu tolak ukur mutu pendidikan adalah dengan melihat hasil Ujian Nasional (UN).

a. Ujian Nasional

1) Pengertian Ujian Nasional (UN)

UN merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan. Kebijakan ini berkaitan dengan berbagai aspek yang dinamis, seperti budaya, kondisi sosial ekonomi, bahkan politik dan keamanan sehingga akan selalu rentan terhadap perbedaan dan kontroversi sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan keputusan politik atau politik pendidikan, yang menyangkut kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan.

UN adalah suatu sistem evaluasi standar untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat_Penilaian Pendidikan. UN dilakukan antara lain untuk menegakkan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, UN harus mampu menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat tentang prestasi yang dicapai oleh setiap sekolah secara keseluruhan. Informasi hasil ujian nasional harus memungkinkan berbagai pihak untuk mengetahui bagaimana biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk prestasi belajar peserta didik.

2) Fungsi dan Tujuan Ujian Nasional

a) Ujian Nasional berfungsi sebagai *Quality Control* terhadap sistem pendidikan.

Karena kontrol terhadap proses dan input pendidikan sudah sedemikian kecil, bahkan pada saat sentralisasi pun sebenarnya kontrol pusat di bidang pendidikan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena rapuhnya mental jaringan birokrasi akibat berbagai faktor di luar masalah pendidikan. Untuk itu, pemerintah telah membebaskan biaya UN untuk semua sekolah (negeri dan swasta), khususnya pada jenjang wajib belajar. Dalam hal ini, setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya, dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan

b) Ujian Nasional dapat memberi andil untuk meningkatkan mutu proses bersekolah.

Hasil ujian dapat memberikan informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa, guru maupun staf pendidikan yang terkait didalam penyelenggaraan ujian untuk dapat bersaing dalam meningkatkan mutu sekolah. Selain itu, ujian dapat menuntun penyusunan dan revisi kurikulum ketika bidang-bidang kelemahan lain terlihat. Sehingga ujian dapat memainkan peran dalam penyuluhan atau bimbingan untuk ke depannya menjadi lebih baik.

c) Ujian Sebagai Evaluasi Sosial

Sejak diperkenalkannya sistem ujian atau tes untuk umum di Amerika Serikat dan negara-negara lain, pengukurannya yang berbentuk umum (publik) tersebut merupakan salah satu model evaluasi dalam pendidikan. Menguji adalah mengevaluasi kemampuan individu. Dengan adanya ujian-ujian tersebut, maka jenis-jenis kemampuan tertentu dipandang menunjukkan status lebih

tinggi dibandingkan dengan kemampuan skolastik umpamanya sering dipandang memiliki status yang lebih tinggi daripada penguasaan kemampuan yang lainnya. Keberhasilan dalam ujian pengetahuan dan kemampuan skolastik selama bertahun-tahun ditentukan oleh kemampuan mengingat fakta-fakta. Kecenderungan ini bukan saja didasari oleh teori psikologi lama, yang memandang bahwa otak yang lebih baik mampu menguasai fakta yang lebih banyak, tetapi juga oleh keadaan masyarakat di mana buku-buku sumber (teks) pengetahuan secara relatif tidak berubah selama dua abad. Karena adanya berbagai kemajuan dalam masyarakat, maka dalam perkembangan selanjutnya jenis kemampuan yaitu kemampuan menyimpulkan dipandang mempunyai nilai yang lebih tinggi.

Ujian bukan saja menunjukkan nilai pengetahuan atau kemampuan secara sosial, tetapi juga telah merupakan peraturan dari sekolah. Dalam dua dekade pertama abad 20 sejumlah ahli psikologi dikumpulkan dalam satu komisi untuk menyusun tes kecerdasan. Hasilnya digunakan untuk menyeleksi anak-anak yang akan masuk ke sekolah menengah yang tidak mampu membayar uang sekolah. Kemudian tes tersebut juga digunakan sebagai alat bagi penentuan kenaikan kelas serta sebagai saringan masuk. Pelaksanaan ujian-ujian tersebut sejalan dengan anggapan mempunyai kemampuan untuk menguasai pengetahuan pada suatu jenis sekolah atau pada sekolah jenjang sekolah tertentu. Sistem ujian yang mempunyai nilai historis ini juga digunakan untuk mengontrol efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sekolah. Apakah sistem ini dipandang baik atau jelek bergantung pada pandangan yang menggunakannya.

Sistem ujian seperti yang dilaksanakan di atas, lebih banyak digunakan untuk mengukur atau menguji kemampuan individu-individu (siswa). Untuk menilai gambaran sekolah secara keseluruhan, yaitu menilai tentang keadaan murid, guru, kurikulum, pembiayaan sekolah, fasilitas sekolah, keseragaman sekolah, penyusunan rancangan dan pemeliharaan sekolah diperlukan sistem pengumpulan data serta penilaian yang lain.

Menurut M.Chabib Thoha dalam Eka Puteri (2013: 15), merinci tujuan evaluasi pendidikan dalam delapan bidang:

(1) Bidang pengajaran

Dalam bidang pengajaran evaluasi bertujuan (1) menetapkan kompetensi isi pengajaran spesifik yang dimiliki oleh peserta didik, (2) memperbaiki proses belajar mengajar.

(2) Hasil belajar

Dalam bidang hasil belajar, evaluasi bertujuan: (1) untuk mengetahui perbedaan kemampuan peserta didik, (2) untuk mengukur keberhasilan mereka baik secara indivual maupun kelompok

(3) Diagnosis dan Usaha Perbaikan

Evaluasi juga bertujuan untuk melakukan diagnosis terhadap kesulitan belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai upaya untuk mengadakan perbaikan terhadap cara belajar dan mengajar yang ada.

(4) Fungsi penempatannya

Evaluasi pendidikan juga bertujuan memperoleh informasi tentang potensi peserta didik sehingga penempatannya dapat disesuaikan dengan bakat dan minatnya.

(5) Fungsi seleksi

Evaluasi dapat dipakai sebagai alat dalam mengadakan seleksi terhadap penerimaan siswa.

(6) Bimbingan dan Penyuluhan

Dari hasil seleksi terhadap penerimaan siswa tersebut, maka hasilnya berfungsi sebagai bahan dalam mengadakan bimbingan dan penyuluhan.

(7) Kurikulum

Evaluasi pendidikan bertujuan melakukan penilaian total terhadap pelaksanaan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan, sehingga dengan demikian dapat dilakukan usaha perbaikan, mencari faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan kurikulum.

(8) Penilaian Kelembagaan

Melalui evaluasi kurikulum suatu lembaga pendidikan dapat diukur keberhasilannya secara operasional, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap efektivitas kelembagaan pendidikan.

Dari uraian tersebut mengenai tujuan evaluasi dapat disimpulkan bahwa tujuan mengevaluasi hasil ujian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik dengan melihat kedudukan kelompoknya, selain itu dapat digunakan untuk mengadakan perencanaan yang realistik dalam mengembangkan dan mengarahkan masa depan para peserta didik. Dengan mengetahui efektivitas dan efisiensi dari hasil ujian nasional, sekolah akan mampu mengukur mutu hasil pendidikan dan dapat mengetahui kemajuan serta kemunduran sekolah sehingga dapat mengadakan perbaikan terhadap proses belajar mengajar maupun kurikulum.

B. Kerangka Berpikir

Sertifikasi guru merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan professionalisme guru baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Peningkatan profesionalisme guru disertai dengan meningkatnya kesejateraan yang diterima oleh guru. Peningkatan profesionalisme guru tentunya juga akan berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan dalam hal ini adalah hasil UN yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tingkat profesionalisme guru yang sudah disertifikasi dapat dilihat dari nilai UKG yang diperoleh untuk guru untuk kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan ke guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Kompetensi guru dilihat berdasarkan bidang studi yang ditetapkan ketika mengikuti sertifikasi dan mutu pendidikan menggunakan nilai UN tingkat SMP di Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2011 – 2013.

Hubungan antara profesionalisme guru yang sudah sertifikasi dan UN dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

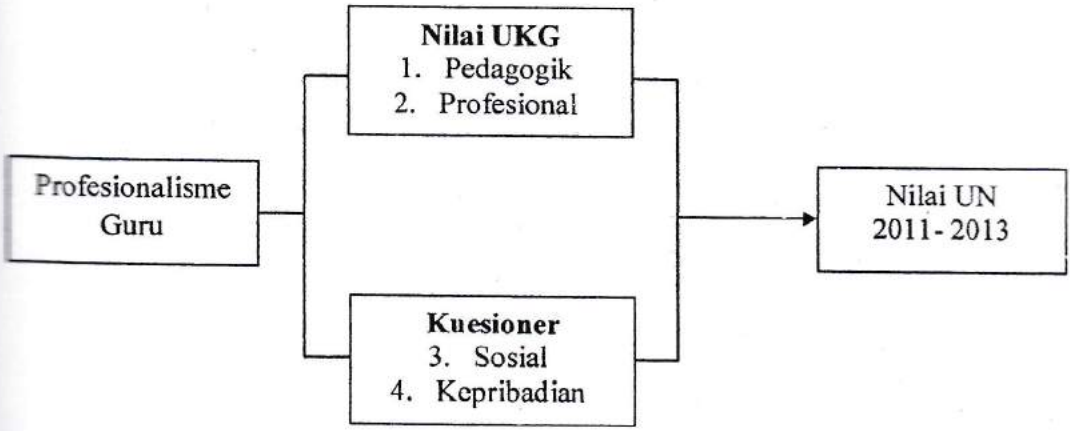

Gambar 2.2. Kerangka berpikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (korelasional). Pada penelitian ini peneliti bermaksud menggambarkan hubungan antara profesionalisme guru yang sudah disertifikasi dengan nilai ujian nasional.

Penelitian deskriptif korelasional adalah penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yaitu variabel bebas dan terikat dengan tanpa melakukan perubahan terhadap objek penelitian.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013: 117).

Menurut Siti Nurhayati (2012: 36) populasi merupakan suatu "*universe*", yakni wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya berupa orang, tetapi bisa juga berupa benda yang lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD/SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala yang sudah mengikuti UKG dan lulus sertifikasi pada tahun 2007-2012 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Sebaran guru yang sudah sertifikasi kabupaten Barito Kuala

No.	Jenjang Sekolah	Sudah sertifikasi (orang)
1	SD	654
2	SMA/SMK	108
Jumlah		762

Sumber: Buku Saku Disdik Barito Kuala (2012)

2. Sampel

Berdasarkan jumlah anggota populasi yang cukup besar maka peneliti menggunakan sampel berdasarkan perhitungan yang dikembangkan oleh *Isaac* dan *Michael* untuk tingkat kesalahan 5%, dengan jumlah populasi untuk tiap jenjang pendidikan diperoleh data sampel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sebaran sampel penelitian

No.	Jenjang Sekolah	Populasi (orang)	Sampel (orang)
1	SD	654	227
2	SMA/SMK	108	84
Jumlah		762	311

Sumber: Data diolah (2014)

Adapun teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive random sampling* dimana sampel berupa guru yang sudah mengikuti UKG dan lulus sertifikasi berdasarkan mata pelajaran yang diampu.

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Angket

Angket atau lebih dikenal dengan istilah kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan/pernyataan suatu alat atau instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer yang bersumber dari responden yang dijadikan sampel atau unit analisis (Siti Nurhayati, 2012: 62).

Skala *Likert's* umumnya digunakan untuk mengukur tanggapan responden atau respon seseorang terhadap obyek yang diteliti, dengan merubah respon/jawaban yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Skala *Likert's* dimulai dengan memberikan pernyataan kepada responden dengan diberi alternatif jawaban berjumlah gasal (3, 5, 7, 9, dst) dimana jawaban disusun secara interval, dan jawaban yang berada di tengah merupakan jawaban netral. Berdasarkan teori tendensi sentral yang menyatakan bahwa adanya kesenjangan jawaban responden yang memusat pada jawaban netral sehingga dalam angket yang digunakan dalam penelitian ini alternatif jawaban responden dimodifikasi menjadi empat alternative saja. Alternatif jawaban itu kemudian diberi skor secara bertingkat (ordinal) dan responden diminta memilih jawaban yang sesuai/diinginkan. Angket/kuesioner digunakan peneliti untuk mengukur variabel bebas yaitu profesionalisme guru dalam hal kompetensi sosial dan kepribadian. Skala penilaian angket dengan skor alternatif jawaban yang terdiri dari pernyataan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Skor alternatif jawaban angket

No	Alternatif Jawaban	Skor Positif	Skor Negatif
1	Tidak pernah	1	4
2	Jarang	2	3
3	Sering	3	2
4	Selalu	4	1

Adapun kisi-kisi angket yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kisi-kisi variabel penelitian

No	Variabel	Indikator	Item
2	Profesionalisme Guru yang sudah disertifikasi	Kompetensi pedagogik	Nilai UKG
		Kompetensi kepribadian	Angket
		Kompetensi social	Angket
		Kompetensi professional	Nilai UKG
3	Ujian Nasional	Data laporan UN tahun 2011-2013	

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara merekam data/keterangan yang diperlukan dengan menggunakan peralatan elektronik yang ada seperti misalnya dengan kamera, tape recorder, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mencari data awal penelitian (data sekunder) yang berupa catatan atau dokumen. Data yang dikumpulkan tersebut adalah bersifat orisinil untuk dapat dipergunakan secara langsung. Teknik ini digunakan untuk membantu peneliti dalam penyimpanan data yang sudah diperoleh. Adapun data berbentuk dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah guru SMP di Kabupaten Barito Kuala yang sudah lulus sertifikasi pada tahun 2007- 2013 dan mengikuti UKG, nilai UN, Nilai UKG untuk masing-masing guru di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

D. Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu uji statistik dasar untuk menentukan deskriptif data mengenai gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi di kabupaten Barito Kuala dengan deskriptif persentase. Dalam analisis ini semua skor dari masing-masing variabel maupun dari setiap sub variabelnya dijumlahkan dan

dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan diperoleh persentase skor.

Untuk mencari persentase digunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} x\ 100\%$$

Keterangan:

F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Banyaknya individu

P = Angka persentase (Anas Sudijono, 2011: 43)

2. Analisis Korelasional

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199 : sangat rendah

0,20 – 0,399 : rendah

0,40 – 0,599 : sedang

0,60 – 0,799 : kuat

0,80 – 1,000 : sangat kuat

Adapun rumus yang digunakan adalah korelasi *product moment*:

$$r_{XY} = \frac{(N(\sum XY)) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{((N\sum X^2) - (\sum X)^2)(N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2)\}}}$$

Keterangan:

r_{XY} = Indeks daya beda butir ke-i

N = banyaknya subjek yang dikenai instrumen

X = skor butir ke-i

Y = skor total (Duwi Priyatno, 2010: 16)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284 km² dan berpenduduk sebanyak 276.066 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten Barito Kuala merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas: sebelah utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan letak astronomis berada pada 2°29'50"-3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur.

Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0% - 2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Jarak kota Marabahan dengan Kota Banjarmasin adalah 47 km, dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menyeberangi Sungai Barito selama 15 menit. Kondisi lahan yang sebagian besar lahan gambut cukup mempengaruhi akses jalan di wilayah ini. Akses dari Marabahan ke berbagai daerah di kabupaten ini beragam tergantung kondisi sarana transportasi yang tersedia. Sebagai contoh jarak sekolah yang terletak Kecamatan Kuripan-Marabahan memerlukan waktu tempuh 4 jam perjalanan dengan menggunakan speedboat. Kecamatan Kuripan merupakan wilayah perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Hal ini menyebabkan konsentrasi pengembangan wilayah berbeda. Untuk wilayah kabupaten bagian selatan sungai Barito yang lebih dekat dengan kota Banjarmasin interaksi sosial ekonominya lebih mengarah ke Banjarmasin. Kabupaten Barito

Kuala terbagi menjadi 3 sub wilayah pembangunan yaitu: Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusatnya Marabahan, meliputi kecamatan Marabahan (kec. pemekaran Bakumpai), Bakumpai (15 desa, 3 kelurahan), Cerbon (8 desa), Barambai (10 desa), Tabukan (13 desa), Kuripan (9 desa), Belawang (28 desa) dan Wanaraya (kec. pemekaran Belawang); Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusatnya Berangas, meliputi kecamatan Alalak (18 desa), Rantau Badauh (9 desa, 2 kelurahan) dan Mandastana (21 desa); Sub Wilayah Pembangunan III dengan pusatnya Tamban, meliputi kecamatan Tamban (16 desa), Anjir Pasar (15 desa), Anjir Muara (15 desa), Mekarsari (9 desa) dan Tabunganen (14 desa). (http://www.depnakertrans.go.id/ microsite/KTM/uploads/MANDASTANA.pdf).

2. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barito Kuala kepada guru-guru Sekolah Dasar (SD) dan guru-guru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengampu mata pelajaran yang di UN-kan. Seluruh responden adalah guru yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan sertifikasi guru. Jumlah awal responden sebanyak 226 untuk guru SD berubah menjadi 103 guru. Sedangkan untuk guru SMA awalnya sebanyak 88 orang berubah menjadi 24 orang. Perubahan jumlah ini terjadi karena ada sebagian guru yang tidak tahu nilai UKG dan dinas pendidikan pun juga tidak memiliki data tersebut sehingga yang kami gunakan sebagai responden adalah guru-guru yang terdaftar mempunyai nilai UKG pada data dari pusat (Puslitjak). Berdasarkan hal tersebut maka jumlah responden menjadi 127 guru.

Adapun sebaran responden berdasarkan bidang studi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Sebaran responden berdasarkan Bidang Ilmu

No	Bidang Ilmu	Jumlah	Persentase (%)
1	Guru kelas	103	81,10
2	Bhs Indonesia	6	4,72
3	Bhs Inggris	3	2,36
4	Biologi	2	1,57
5	Ekonomi	4	3,15
6	Kimia	7	5,51
7	Matematika	2	1,57
Jumlah		127	100

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian (2014)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

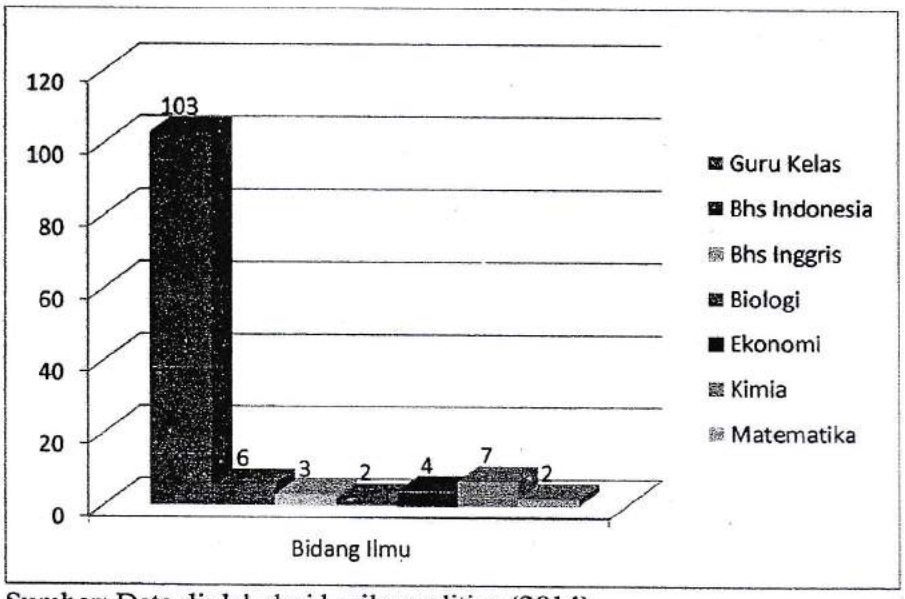

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian (2014)
Gambar 4.1 Sebaran responden berdasarkan bidang ilmu

Berdasarkan table dan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah guru pada bidang ilmu guru kelas sebanyak 103 guru. Sedangkan untuk bidang ilmu yang paling sedikit adalah bidang ilmu Matematika dan Biologi yang hanya sebanyak 2 orang guru.

3. Hasil Penelitian

a. Uji Deskriptif

1) Gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala

Tabel 4.2 Rekap Kompetensi Guru SD di Barito Kuala

No	Indikator	Rentang	Frekuensi	Persentasi (%)
1	Nilai UKG	< 50 (Rendah)	78	75,5
		50 – 70 (Sedang)	25	24,3
2	Kompetensi keseluruhan	0 – 186,94 (Rendah)	24	23,3
		186,95 – 199,62 (Sedang)	27	26,2
		199,63 – 246,00 (Tinggi)	52	50,5

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan nilai UKG yang diperoleh guru dapat disimpulkan bahwa sebagian besar memperoleh nilai di bawah 50 sehingga dapat dikatakan bahwa secara garis besar gambaran nilai UKG adalah rendah. Secara keseluruhan kompetensi yang dimiliki guru berdasarkan 4 kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) berada pada rentang 199,63 – 246 pada kategori Tinggi.

Tabel 4.3 Rekap Kompetensi Guru SMA/SMK di Barito Kuala

No	Indikator	Rentang	Frekuensi	Persentasi (%)
1	Nilai UKG	< 50 (Rendah)	11	45,8
		50 – 75 (Sedang)	13	54,2
2	Kompetensi keseluruhan	0 – 196,5 (Rendah)	6	25
		196,6 – 210,5 (Sedang)	6	25
		210,6 – 233 (Tinggi)	12	50

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar untuk guru SMA/SMK mempunyai nilai UKG kategori sedang. Dilihat dari gambaran kompetensi secara keseluruhan (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian)

termasuk dalam kategori Tinggi dan gambaran mutu dilihat dari nilai UN diperoleh rentang tertinggi pada kelas 6,39 – 7,71 dengan kategori Sedang.

2) **Gambaran Mutu Pendidikan di Tingkat SD dan SMA/SMK Kabupaten Barito Kuala**

Tabel 4.4 Gambaran Nilai UN untuk SD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 6,06 (Rendah)	14	13.6	13.6	13.6
	6,69 - 8,41 (Tinggi)	89	86.4	86.4	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian (2014)

Berdasarkan table 4.4 diperoleh gambaran mutu UN untuk tingkat SD jumlah terbanyak terletak pada rentang 6,69 – 8,41 sehingga dapat disimpulkan bahwa gambaran mutu pendidikan di tingkat SD pada kategori Tinggi.

Tabel 4.5. Gambaran Nilai UN untuk SMA/SMK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 6,38 (Rendah)	4	16.7	16.7	16.7
	6,39 - 7,71 (Sedang)	15	62.5	62.5	79.2
	7,72 - 8,9 (Tinggi)	5	20.8	20.8	100.0
	Total	24	100.0	100.0	

3) **Pengaruh Kompetensi guru yang disertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala**

Tabel 4.6 Korelasi kompetensi dengan Nilai UN Tingkat SD

No	Kompetensi	r_{hitung}
1	Pedagogik	0,195
2	Profesional	0,275
3	Sosial	0,211
4	Kepribadian	0,271
5	Nilai UKG	0,272
6	Keseluruhan	0,370

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketika dilihat hubungan antara nilai UN dengan masing-masing kompetensi, terlihat bahwa ketika dihubungkan satu persatu (parsial) terlihat bahwa pengaruh yang ditimbulkan terhadap peningkatan nilai UN relatif kecil, namun ketika dilihat dari keseluruhan kompetensi maka memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan ketika satu persatu. Ini menunjukkan bahwa kompetensi guru akan lebih baik dampaknya terhadap nilai UN ketika dilihat dan dinilai secara keseluruhan. Nilai untuk masing-masing kompetensi lebih besar dari r_{tabel} untuk N= 103 dengan taraf kepercayaan sebesar 95% adalah 0,192. Adapun besarnya pengaruh keseluruhan (simultan) yang terjadi sebesar 0,370 x 100% = 37,0% dengan kategori rendah. Artinya bahwa secara keseluruhan kompetensi guru mempengaruhi peningkatan terhadap nilai UN sebesar 37,0%. Jika dilihat dari nilai UKG yang diperoleh guru dikaitkan dengan nilai UN juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan karena mempunyai nilai r_{hitung} sebesar 0,272 lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,192.

Tabel 4.7 Korelasi kompetensi dengan Nilai UN Tingkat SMA/SMK

No	Kompetensi	r_{hitung}
1	Pedagogik	0,450
2	Profesional	0,489
3	Sosial	0,449
4	Kepribadian	0,499
5	Nilai UKG	0,584
6	Keseluruhan	0,730

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketika dilihat hubungan antara nilai UN dengan masing-masing kompetensi, terlihat bahwa ketika dihubungkan satu persatu (parsial) terlihat bahwa pengaruh yang ditimbulkan terhadap peningkatan nilai UN relatif kecil, namun ketika dilihat dari keseluruhan

kompetensi maka memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan ketika satu persatu. Ini menunjukkan bahwa kompetensi guru akan lebih baik dampaknya terhadap nilai UN ketika dilihat dan dinilai secara keseluruhan. Nilai untuk masing-masing kompetensi lebih besar dari r_{tabel} untuk N= 24 dengan taraf kepercayaan sebesar 95% adalah 0,388. Adapun besarnya pengaruh keseluruhan (simultan) yang terjadi sebesar 0,730 x 100% = 73,0% dengan kategori kuat. Artinya bahwa secara keseluruhan kompetensi guru mempengaruhi peningkatan terhadap nilai UN sebesar 73,0%. Jika dilihat dari nilai UKG yang diperoleh guru dikaitkan dengan nilai UN juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan karena mempunyai nilai r_{hitung} sebesar 0,584 lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,388.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi di tingkat SD dan SMA/SMK kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS diperoleh bahwa secara keseluruhan kompetensi guru SD di Barito Kuala dengan kategori tinggi. Gambaran kompetensi secara keseluruhan diperoleh rentang pada kategori Tinggi. Ini artinya bahwa pada tingkat SD, sebagian besar responden sudah memiliki kompetensi yang sangat baik walaupun masih memiliki kompetensi yang rendah untuk pedagogic dan professional (dilihat dari nilai UKG). Baiknya kompetensi yang dimiliki berdampak pada baiknya proses pembelajaran yang akhirnya akan mampu meningkatkan mutu pendidikan berupa berhasilnya peserta didik memperoleh nilai UN yang lebih baik.

Sedangkan untuk gambaran kompetensi di tingkat SMA/SMK secara keseluruhan mempunyai kategori nilai yang tinggi, sedangkan dilihat dari nilai UKG diperoleh rentang nilai sedang.

2. Gambaran Mutu Pendidikan Tingkat SD dan SMA/SMK di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai UN tingkat SD di kabupaten Barito Kuala berada pada rentang nilai 6,69 – 8,41 dengan kategori tinggi dengan rerata sebesar 6,82. Sedangkan gambaran mutu pendidikan dilihat dari nilai UN untuk tingkat SMA/SMK diperoleh rentang nilai sebesar 6,39 – 7,71 dengan kategori sedang dengan rerata sebesar 7,10.

Terlihat bahwa rerata yang diperoleh berada di atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5,5 untuk tiap mata pelajaran pada tahun 2013. Artinya bahwa pembelajaran sudah berhasil karena kompetensi dan indikator untuk setiap materi pelajaran sudah tercapai.

3. Pengaruh Kompetensi Guru yang Disertifikasi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Tingkat SD dan SMA/SMK Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, secara keseluruhan nilai r_{hitung} kompetensi guru SD sebesar 0,370 lebih besar dari r_{tabel} dengan taraf kepercayaan 95% untuk N=103 adalah 0,192. Artinya bahwa kompetensi guru secara keseluruhan mempengaruhi nilai UN sebesar 37,0% dengan kategori rendah. Sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kompetensi professional merupakan kompetensi yang dominan mempengaruhi peningkatan nilai UN sebesar 27,5% dan yang paling rendah adalah kompetensi pedagogik dengan besaran pengaruhnya adalah 19,5%.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, secara keseluruhan nilai r_{hitung} kompetensi guru SMA/SMK sebesar 0,730 lebih besar dari r_{tabel} dengan taraf kepercayaan 95% untuk N=24 adalah 0,388. Artinya bahwa kompetensi guru secara keseluruhan mempengaruhi nilai UN sebesar 73% dengan kategori kuat. Sedangkan sisanya sebesar 27% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti motivasi, minat, bakat, sarana dan prasarana dan lain-lain. Kompetensi kepribadian

merupakan kompetensi yang dominan mempengaruhi peningkatan nilai UN sebesar 58,4% dan yang paling rendah adalah kompetensi sosial dengan besaran pengaruhnya adalah 44,9%.

Adanya sertifikasi menyebabkan kompetensi guru dapat meningkat karena sebagian guru menyisihkan anggaran dari tunjangan sertifikasi untuk usaha meningkatkan kompetensi seperti mengikuti seminar dan pelatihan bahkan meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi, membeli laptop sebagai penunjang pembelajaran dan lain-lain. Peningkatan kompetensi ini tentunya akan menyebabkan pembelajaran akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai UN yang diperoleh siswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran profesionalisme guru yang sudah disertifikasi di tingkat SD dan SMA/SMK di kabupaten Barito Kuala dilihat dari kompetensi yang dimiliki termasuk tinggi.
2. Gambaran mutu pendidikan dilihat dari rata-rata nilai UN untuk tingkat SD di kabupaten Barito Kuala termasuk kategori tinggi dan pada tingkat SMA/SMK termasuk kategori sedang.
3. Terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara profesionalisme guru dilihat dari kompetensi yang dimiliki dengan nilai UN yang diperoleh siswa pada tingkat SD dan SMA/SMK.

B. Opsi Kebijakan

1. Berdasarkan gambaran nilai UKG yang diperoleh guru mata pelajaran yang di-UN-kan di kabupaten Barito Kuala terlihat bahwa kompetensi pedagogik yang paling rendah nilainya. Untuk itu hendaknya pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala dalam hal ini dinas pendidikan melakukan analisis soal dan jawaban untuk kompetensi pedagogik sehingga diketahui indikator apa yang tidak tercapai. Diketahuinya indikator-indikator tersebut tentunya akan memudahkan dinas pendidikan untuk melakukan pembinaan dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan diri guru.
2. Tidak tersedianya data nilai UKG baik pada guru yang bersangkutan maupun dinas pendidikan menyebabkan kebingungan di kalangan guru berkaitan dengan kualitas dan mutu pembelajaran yang selama ini dilakukan. Untuk itu hendaknya dinas pendidikan mempunyai bank data khusus tentang nilai UKG untuk semua guru di kabupaten Barito Kuala. Adanya bank data tersebut dapat menjadikan tolak ukur tingkat keberhasilan pendidikan di kabupaten Barito Kuala.

3. Banyaknya guru yang tidak menggunakan layanan internet baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran tentunya akan menghambat kemajuan di bidang pendidikan. Banyaknya daerah yang tidak terjangkau layanan internet menunjukkan bahwa pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur masih belum merata. Hendaknya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan di bidang internet misalnya mengadakan layanan internet desa atau kecamatan dengan menggunakan mobil.
4. Hendaknya dinas pendidikan melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam dunia pendidikan seperti LPTK dan LPMP untuk mengadakan kegiatan pembinaan dalam usaha pengembangan kompetensi guru misalnya dengan melakukan:
   a. Beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan pendidikan.

      Banyaknya guru yang tidak berlatar belakang pendidikan tentunya akan menyebabkan pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan misalnya dengan memberikan bantuan dana untuk mengikuti S1 penyetaraan atau S2 kependidikan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan bertahap misalnya untuk satu tahun ada sekitar 10 guru yang melanjutkan pendidikan, tahun berikutnya 10 guru dan seterusnya. Namun ini memerlukan adanya penganggaran khusus dari APBD.
   b. Pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi.

      Adanya analisis hasil UKG tentunya akan menggambarkan peta kompetensi yang jelas dan indikator apa saja yang sudah terpenuhi. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dapat menyusun pelatihan untuk kompetensi-kompetensi yang belum tercapai.
   c. Simposium Guru

      Banyaknya guru yang jarang menulis karya ilmiah tentunya menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum mempunyai keberanian untuk menulis karya ilmiah. Ini bisa saja karena tidak adanya pengetahuan tentang penelitian itu sendiri ataupun karena

tidak ada wadah yang mudah untuk mempublikasikan hasil penelitian. Simposium untuk guru dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Guru-guru yang berprestasi dan mempunyai hasil penelitian tentang pendidikan (PTK) dapat menyampaikan dalam symposium tersebut, dan hasilnya dapat berupa prosiding ataupun jurnal yang bisa dijual kepada kalangan guru ataupun umum. Selain guru-guru tersebut dapat menyebarluaskan hasil penelitian, mereka juga mendapat angka kredit untuk naik pangkat dan tentunya uang dari hasil penjualan karya ilmiah tersebut.

d. Pemberian penghargaan kepada guru-guru yang melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

   Banyaknya guru yang jarang melakukan PTK, membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan mereka akan penelitian. Padahal dalam setiap pembelajaran pasti ada masalah yang dihadapi. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakannya PTK. PTK tidak harus sendiri, bisa dilakukan bekerja sama dengan teman sejawat ataupun LPTK. Guru-guru yang melakukan PTK hendaknya diberi penghargaan berupa sertifikat ataupun uang pembinaan sehingga memotivasi guru-guru untuk selalu melakukan penelitian.

e. Pembinaan kegiatan guru magang

   Guru-guru yang masih kurang berkompeten atau baru diangkat dapat dilakukan pemagangan ke sekolah yang dianggap mampu dan berkompeten untuk melakukan pembinaan. Ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga guru yang professional.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Mulyani. 2012. *Evaluasi Program Sertifikasi Guru di Kota Cilegon.* Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang: Banten.

Anas Sudijono. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo (Rajawali Press).

Cepi Triana. 2009. Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru dan Mutu Pembelajaran. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197907232001121-CEPI_TRIATNA/LAP_FUNDAMENTAL_Cepi_2009 ADPEND/BAB_II_KAJIAN_PUSTAKA.pdf Akses tanggal 17 April 2014.

Chomsin S. Widodo dan Jasmadi. 2008, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta

Duwi Priyatno. 2010. *Pahamm Analisa Statistik Data dengan SPSS.* Jakarta: PT. Buku Seru

Eka Puteri. 2013. Pengaruh Sarana dan Prasarana Belajar Beserta Pemanfaatannya Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun pelajaran 2012/2013. Skripsi. FKIP Unlam: Banjarmasin.

Fasli Jalal, 2007. *Tanya Jawab tentang Sertifikasi Guru.* Jakarta: Dirjen PMPTK.

Hasanuddin dan Cut Nurmaliah. 2010. *Kompetensi pedagogik guru biologi yang telah lulus Sertifikasi di SMA Negeri kota Banda Aceh.* Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

Jamil Suprihatiningrum. 2013. *Guru Profesional, Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Kunandar. 2007. Guru Profesional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Masnur Muslih. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme* Pendidik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Paul Suparno. Harian Kedaulatan Rakyat. 15 Nopember 2005

Ramayulis. 2013. *Profesi dan Etika Keguruan.* Jakarta: Kalam Mulia.

Sigit Santosa. 2011. *Penelitian Pendidikan.* Cetakan 1. Surakarta: UNS Press.

Siti Nurhayati. 2012. *Metodologi Penelitian Praktis.* Edisi Dua. Pekalongan

Tim. 2013. *Buku 2: Panduan Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Rayon LPTK.* Jakarta.

Triton Prawira Budi. 2006. *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik.* Yogyakarta. CV. ANDI Offset.